



# INDONESIA THE MINING LAW

## REVIEW

Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia  
Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara

Penulis:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H.

Dr. Ismail Rumadan

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein

Dr. Isnawati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H.

Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

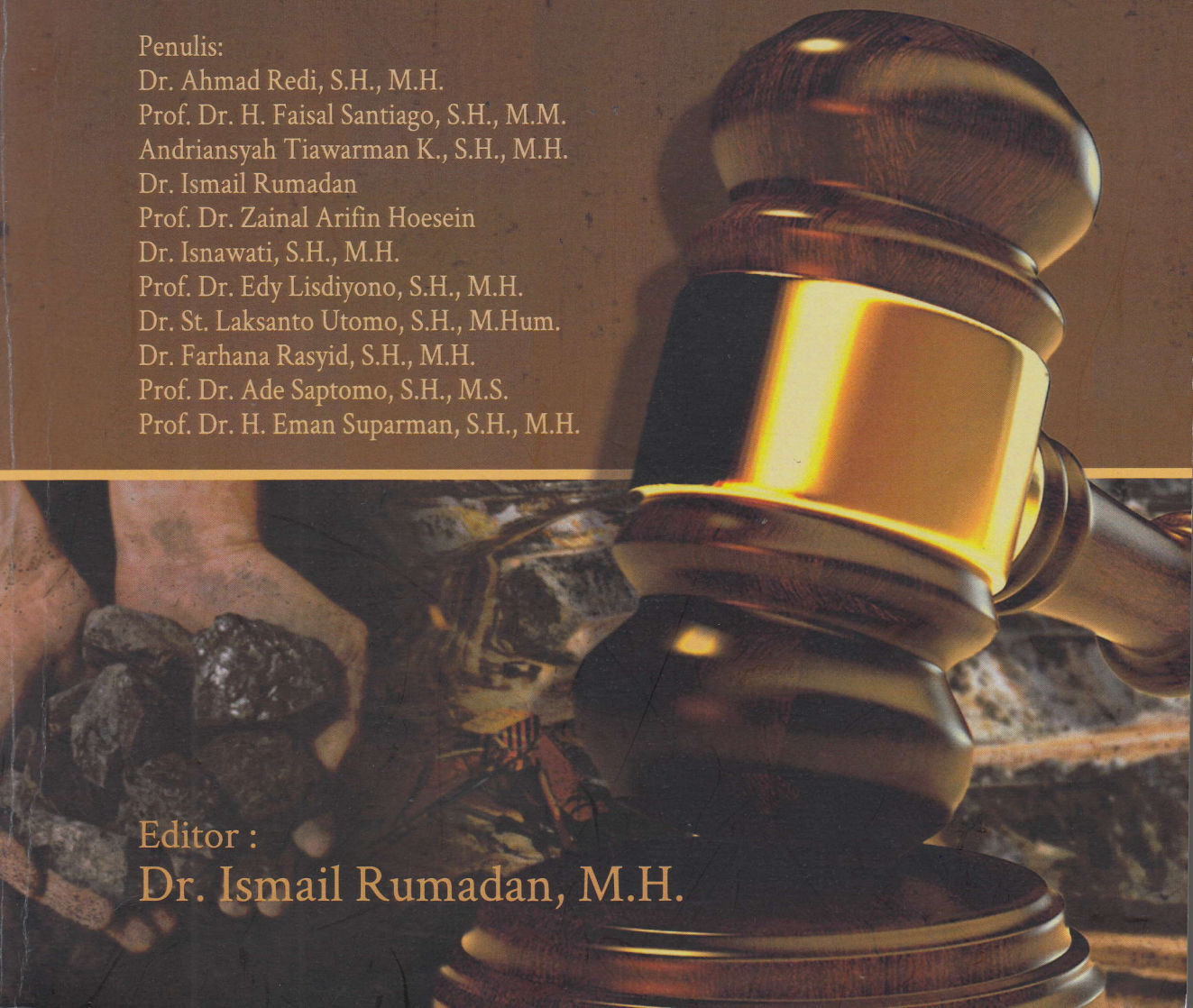
Dr. Farhana Rasyid, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Ismail Rumadan, M.H.



# **INDONESIA THE MINING LAW REVIEW**

**Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia  
Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara**

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.  
Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.  
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H.  
Dr. Ismail Rumadan  
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein  
Dr. Isnawati, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.H.  
Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.  
Dr. Farhana Rasyid, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., M.S.  
Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

**INDONESIA THE MINING LAW REVIEW  
TELAHAH ATAS KEBIJAKAN HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA  
PASCA PERUBAHAN UU MINERAL DAN BATU BARA**

**Ahmad Redi, dkk.**

Editor :  
**Ismail Rumadan**

Desain Cover :  
**Dwi Novidiantoko**

Sumber :  
www.shutterstock.com

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Gofur Dyah Ayu**

Ukuran :  
xii, 234 hlm, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :  
978-623-02-1873-6

Cetakan Pertama :  
November 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl. Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

# INDONESIA THE MINING LAW REVIEW

Semangat penguasaan, pengaturan, dan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara oleh negara sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pengelolaan yang harus dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna menjamin dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Undang-undang tersebut juga diharapkan mengatur tentang pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, dalam perkembangannya UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini menuai berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan proses pengesahan UU minerba tersebut sangat cepat yang ditengarai sebagai bentuk sikap pemerintah dan DPR yang sangat sigap menyusun undang-undang yang melayani kepentingan investasi tambang atau pemilik modal, meskipun UU minerba yang baru ini berpotensi mengancam kepentingan nasional terhadap mineral dan batubara. Sementara, di sisi lain perubahan terhadap UU minerba ini terkesan sangat lamban dalam merespons tuntutan dan keinginan masyarakat atas berbagai persoalan, seperti IUP (Ijin Usaha Tambang) dan IUPK (Ijin Usaha Tambang Khusus), kemudiaman pengelolaan pertambangan yang sangat sentralistis sebab kehadiran UU minerba ini telah menarik kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan ke pemerintah pusat. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup yang ditandai dengan dihapusnya kewajiban amdal bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Indonesia serta tidak adanya keberpihakan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas kemudian menjadi sorotan yang kemudian dituangkan ke dalam buku ini sebagai satu karya untuk disuguhkan kepada masyarakat, terutama kepada kalangan akademisi sebagai referensi tambahan dan pembandingan dalam mempelajari dan mendalami kebijakan hukum di bidang pertambangan di Indonesia.



**Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)**  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
☎ cs@deepublish.co.id 📧 @penerbitbuku\_deepublish  
📘 Penerbit Deepublish 🌐 www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Hukum

ISBN 978-623-02-1873-6



9 786230 218736